

## **BAB V KESIMPULAN**

Ethiopia merupakan sebuah negara yang memiliki keunikan sendiri. Negara yang dikenal dengan negara tanduk Afrika tersebut, satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah selama masa perebutan Afrika. Ethiopia juga termasuk ke dalam salah satu negara termiskin di dunia, meski negara tersebut diberkahi sumber daya alam yang berlimpah. Salah satunya yaitu sumber air Sungai Nil Biru yang bersumber di Ethiopia. Namun, negara yang berbentuk federasi tersebut belum mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya semaksimal mungkin.

Sungai Nil Biru itu sendiri merupakan cabang dari Sungai Nil yang menyumbang sekitar 86% air di Sungai Nil. Sungai Nil merupakan Sungai terpanjang di dunia yang mengalir 11 negara dengan panjang sekitar 4.160 mil. Sungai Nil sebagai sumber kehidupan bagi negara disekitarnya, termasuk Ethiopia. Sungai Nil Biru memiliki peran penting bagi kehidupan ekonomi Ethiopia. Perekonomian Ethiopia yang berbasis pertanian, tentu sangat membutuhkan sumber air yang cukup. Terlebih lagi Ethiopia yang sering mengalami bencana kekeringan dan kelaparan tentu menjadikan air sebagai sumber kehidupan penduduknya.

Selain bencana kekeringan dan kelaparan yang sering melanda negara tersebut, faktor lain yang menjadikan perekonomian Ethiopia tidak stabil yaitu kekurangan energi listrik yang juga dialami oleh negara tersebut. Ethiopia hanya kapasitas produksi listrik sebesar 3.200 megawatt, dan hanya mengkonsumsi listrik sebesar 65 kilowatt jam yang dimana rata-rata penggunaan listrik dunia sekitar 3.104 kilowatt jam. Hal tersebut yang menjadikan Ethiopia sebagai negara dengan konsumsi listrik terendah di dunia. Yang sebenarnya, jika Ethiopia mampu memanfaatkan sumber daya alam yang

dimilikinya, yaitu sumber air Sungai Nil Biru, Ethiopia diperkirakan akan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan terus menjadikan Ethiopia lebih terbelakang.

Menyadari hal tersebut, Ethiopia pun merencanakan membuat sebuah bendungan raksasa yang diperkirakan akan menjadi bendungan terbesar di Afrika. Proyek bendungan tersebut sebenarnya bukanlah bendungan pertama yang dibangun oleh Ethiopia. Sebelumnya Ethiopia telah mencoba membangun beberapa bendungan lainnya. Namun, bendungan yang akan dibangun kali ini merupakan bendungan terbesar yang pertama kali akan dibangun oleh Ethiopia. Bendungan yang diperkirakan senilai \$4.2 miliar tersebut bernama *Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)*. GERD akan menampung sekitar sebanyak 74 miliar meter kubik air Sungai Nil serta menghasilkan tenaga listrik sebesar 6000 Megawatt yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan energi dalam negeri yang kronis, membantu rumah tangga negara (terutama yang berada di daerah pedesaan) beralih ke bentuk energi yang lebih bersih dan memungkinkan pemerintah memperoleh devisa melalui ekspor listrik ke negara lain di wilayah ini.

Dalam proses pembangunan proyek GERD, Ethiopia telah mendanai proyek tersebut dari sumber keuangannya sendiri. Ethiopia memilih menjual obligasi kepada warga di dalam maupun luar negeri. Dimana Ethiopia meminta agar pegawai pemerintah menyumbangkan gajinya untuk pembelian obligasi. Selain itu, terdapat peran China dalam pendanaan proyek tersebut. China meminjamkan dana sebesar \$1 miliar. Bantuan dana tersebut tidak lepas dari kepentingan China yang sebenarnya ingin mendapatkan keuntungan dari bendungan raksasa tersebut.

GERD tersebut pun resmi diumumkan pada tahun 2011 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2017. Namun, rencana pembangunan proyek itu mendapat penolakan keras dari Mesir. Mesir sebagai negara hilir yang mendapat pasokan air lebih banyak dari Sungai Nil Biru merasa sangat keberatan atas pembangunan bendungan raksasa tersebut. Mesir

mengkawatirkan bahwa bendungan tersebut akan mengurangi pasokan air yang akan mengalir ke Mesir. Mesir juga menganggap bahwa proyek tersebut dibangun tidak berdasarkan kerangka hukum resmi manapun. Mesir mengklaim Ethiopia telah melanggar perjanjian 1929 dan 1959 atas hak pengelolaan Sungai Nil. Dimana perjanjian 1929 merupakan perjanjian antara Mesir dan Inggris yang menyatakan bahwa segala proyek yang dibangun di sekitar Sungai Nil haruslah atas dasar ijin Mesir dan tidak ada satu proyek pun yang dapat mempengaruhi jumlah debit air Sungai Nil yang mengalir di Mesir. Sedangkan, Perjanjian 1959 merupakan Perjanjian Bilateral antara Mesir dan Sudan yang bahwasanya mengalokasikan 48 miliar meter kubik per tahun ke Mesir sebagai haknya dan 4 miliar meter kubik per tahun ke Sudan.

Ethiopia pun menyadari bahwa pembangunan bendungan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Terlebih lagi kekuatan ekonomi, militer dan politik Ethiopia tidak mampu menghentikan segala macam ancaman dari negara hilir. Akhirnya pada tahun 2013, Ethiopia sepakat untuk meratifikasi *Cooperation Framework Agreement* (CFA). CFA merupakan sebuah kerangka kerja sama permanen yang dibuat melalui *Nil Basine Initiative* (NBI). Dimana tujuan dibentuknya CFA guna membentuk hukum komprehensif baru yang menjamin akses yang adil dan penggunaan yang setara di seluruh wilayah sungai. Yang tentu saja menggantikan perjanjian 1929 dan 1959 yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Keputusan Ethiopia sebagai negara pertama yang meratifikasi CFA merupakan keputusan atas dasar pertimbangan rasional guna mencapai kepentingan ekonominya, yaitu dapat membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (DAM) dengan lancar dibawah kerangka hukum yang resmi. Dimana dengan meratifikasi kerangka kerja sama baru tersebut, Ethiopia memiliki hukum dasar yang kuat dan resmi dalam proyek pembangunan bendungannya tersebut yang merupakan sebuah kepentingan ekonomi Ethiopia. Ethiopia memiliki hak untuk membangun bendungan tersebut

menurut isi dari kerangka kerja sama tersebut. Sehingga Mesir tidak memiliki alasan yang kuat untuk membatalkan proyek bendungan Ethiopia.

Selain itu, dengan meratifikasi CFA, Ethiopia memperoleh keuntungan dalam mencapai kepentingan politiknya, yaitu meningkatkan eksistensinya dalam lingkup NBI sebagai negara pertama yang meratifikasi CFA, memiliki kekuatan politik dalam pengelolaan air Sungai Nil serta sebagai bentuk penolakan atas Perjanjian 1929 dan 1959 guna melemahkan perjanjian lama tersebut.

Dimana langkah Ethiopia untuk meratifikasi CFA pun diikuti oleh beberapa negara riparian lainnya, seperti Uganda dan Tanzania. Semakin banyak yang meratifikasi CFA, maka membuka peluang untuk benar-benar menghapus perjanjian lama. Eksistensi Ethiopia pun mulai meningkat dan Ethiopia mulai dianggap sebagai pemimpin blok hulu yang menggerakkan negara-negara hulu untuk meratifikasi CFA. Posisi Ethiopia kini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kerangka kerja baru tersebut. Yang tentu memperkuat politik Ethiopia itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung, negara-negara yang mengikuti langkah Ethiopia akan memberi dukungan proyek bendungan yang diprakarsai oleh Ethiopia itu sendiri.